BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki multifungsi terutama dalam membangun generasi bangsa yang lebih berkualitas di masa depan. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Engkoswara (2004:5) memaparkan bahwa, "Pendidikan menjadi primadona pembangunan nasional untuk membina karakter atau tabiat bangsa yang tangguh yang dilandasi oleh nilai-nilai atau budaya Pancasila." Penanaman nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam membekali anak dengan kemampuan *soft skill*.

Demikian pulan halnya dengan pendidikan jasmani, Corbin, *et al.* (1979:1) menjelaskan bahwa, "Physical education is important of one's total education." Sebagai bagian penting dari pendidikan, pembelajaran pendidikan jasmani secara utuh berperan dalam meningkatkan kualitas peserta didiknya. Terjadinya perubahan perilaku siswa secara positif seperti kebiasaan bergerak, menjaga kebugaran, disiplin, menghargai teman menjadi salah satu indikator pencapaian hasil belajar melalui pendidikan jasmani. Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi guru pendidikan jasmani saat ini adalah kemampuannya untuk memelihara perilaku siswa

untuk dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan meraih tujuan pendidikan secara komprehensif. Kondisi faktual menunjukkan bahwa guru pendidikan jasmani dihadapkan pada berbagai persoalan yang sering terjadi terutama perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para siswa. Hasil penelitian dari Lavay, *et al.* (1997:6) telah membuktikan bahwa, "Teachers and parents have cited a lack of discipline and control as one of the major obstacles educators face in teaching students effectively." Kurangnya disiplin dan rendahnya moral para siswa saat ini telah menjadi fokus isu yang perlu ditanggulangi secara cepat dan tepat.

Rekomendasi Kongres Dunia tentang pendidikan jasmani di Berlin, Jerman telah mengumpulkan beberapa hasil survey tingkat global yang disimpulkan oleh Rusli Lutan (1999:1) bahwa, "Pendidikan jasmani mengalami ancaman dan tekanan yang serius dengan berbagai pertanda, seperti dipandang sebagai bidang studi yang dikepinggirkan; tidak penting bagi karir." Ada beberapa indikasi krisis dalam pembelajaran pendidikan jasmani, mulai dari alokasi waktu yang terbatas, kelangkaan infrastruktur, kualifikasi tenaga yang tidak sesuai, pelaksanaan pengawasan yang belum optimal, hingga dana (*financial*) yang sangat minim. Kondisi ini menjadi bukti bahwa pembelajaran pendidikan jasmani mengalami keterlantaran yang amat kronis dan implikasinya sangat dirasakan pada pelaksanaan PBM pendidikan jasmani.

Isu kritis ini sangat dirasakan terutama dalam konteks pendidikan jasmani di tingkat sekolah dasar (SD), yang dipandang sebagai peletakan dasar kependidikan. Guru, sebagai sumber utama dalam proses pembelajaran di SD, tentunya memiliki tanggung jawab paling besar dalam upaya mengefektifkan pembelajaran. Efektivitas pembelajaran pendidikan jasmani tercermin dalam keterlibatan siswa selama dan

setelah pembelajaran itu berakhir. Hyland (1990:51) memaparkan, "The essence of good teaching in physical education is that the kids should enjoy the experience and choose to continue to participate in activity when school is over." Hakekat pembelajaran pendidikan jasmani yang baik adalah siswa harus dapat menikmati pengalaman dan memilih untuk melanjutkan keterlibatannya dalam aktivitas tersebut di luar jam pelajaran. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan secara periodik agar kinerja guru pendidikan jasmani dan hasil belajar siswa dapat terpantau secara cermat.

Dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif sangat diperlukan berbagai faktor pendukung. Dharma (2001:13) menetapkan bahwa, "Faktor pendukung yang diperlukan dalam pengawasan adalah manusia." Faktor manusia menunjukkan adanya keterlibatan kedua belah pihak yakni pengawas dan guru. Apabila keduanya saling bersinergi dalam menjalankan tugasnya masing-masing, pelaksanaan pengawasan akan dapat berjalan efektif. Apalagi dengan dukungan supra sarana seperti kebijakan dinas pendidikan dan sarana penunjang seperti sarana pembelajaran, dukungan teknologi, iklim kerja, dan kesejahteraan guru akan lebih menopang terlaksananya proses pengawasan yang efektif dalam kontek pendidikan.

Penggunaan model pengawasan selama ini belum menjadi tuntutan, sehingga pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara tepat. Bahkan pengawas cenderung hanya mengawasi yang berhubungan dengan urusan administratif dan tidak menyentuh hal-hal yang bersifat subtantif. Kenyataan itu sering membuat guru pendidikan jasmani kurang diperhatikan. Implikasinya guru menjadi frustasi dan malas dalam mengajar karena suasana kerja menjadi tidak kondusif. Gerungan (2004:133) memaparkan bahwa, "Suasana kerja di tempat kelompok itu berada

sebaiknya memberikan kesan kepada semua anggota bahwa mereka dianggap setaraf." Jadi, pengawas harus memberikan perlakuan yang sama dalam proses pengawasan kepada guru pendidikan jasmani maupun guru kelas. Untuk menanggulanginya guru sangat memerlukan proses pembinaan dalam berbagai hal agar mampu menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif dan positif.

Salah satu kegiatan manajemen pendidikan yang harus dilaksanakan di sekolah adalah pengawasan. Pengawasan pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan manajemen pendidikan yang perlu diupayakan secara simultan dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Bukti yang menunjukkan bahwa pengawasan menjadi bagian dari manajemen pendidikan nasional adalah terdapatnya bab khusus mengenai pengawasan dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yaitu pasal 66 yang berbunyi, "Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing." Ketentuan mengenai pengawasan tersebut lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah (PP), Oleh karena itu, pengawasan pendidikan mempunyai kedudukan strategis dan penting dalam manajemen pendidikan, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk berupaya secara terus menerus menjadikan para pelaksana pengawasan pendidikan sebagai tenaga yang profesional.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan profesionalisasi tenaga pengawas pembelajaran pendidikan jasmani adalah dengan dikeluarkannya sebuah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

menjelaskan bahwa, "Dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan pembelajaran di sekolah, pemerintah telah menetapkan standar kinerja pengawas menjadi jabatan fungsional pengawas sekolah yang sebelumnya hanya tugas administratif." Hal ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengawasan pembelajaran (quality control) di sekolah dalam upaya meningkatkan kinerja guru dan hasil belajar siswa yang menjadi indikator mutu pendidikan.

Perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan tersebut dalam pelaksanaannya tidak akan dapat menghindarkan diri dari berbagai hambatan. Hambatan yang dihadapi terutama berkaitan dengan kondisi nyata di lapangan bahwa pengawas sekolah memiliki citra yang kurang baik. Hal ini sebagai dampak dari pelaksanaan tugas yang hanya menekankan pada aspek administratif daripada subtantif pengajaran. Seperti kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto (2000:186) menjelaskan bahwa, "Pada umumnya penyelenggaraan pengawasan pengajaran pendidikan jasmani oleh pengawas SD dan kepala sekolah masih menitikberatkan pada aspek administratif." Jadi pembinaannya belum menyentuh pokok persoalan utama dalam pelaksanaan pengawasan.

Jadi, faktor penghambat dalam efektivitas pembinaan guru lebih pada faktor pribadi; yakni ketidakmampuan para pengawas untuk melaksanakan pembinaan terhadap guru pendidikan jasmani secara efektif karena keterbatasan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan bahkan kepribadiannya (*personality*). Menurut pernyataan ketua KKPS (Kelompok Kerja Pengawas Sekolah) se Kota Bandung tahun 2005 bahwa yang memperburuk citra dan kinerja pengawas sekolah adalah latar belakang pengawas yang tidak menguasai bidangnya serta tidak cukup memiliki motivasi dan peluang yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai gambaran dari studi pendahuluan berupa analisis kondisi berkenaan dengan implementasi model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani di SD oleh pengawas sekolah di Kota Bandung, sebagai berikut:

1. Realitas pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah menunjukkan bahwa pengawas pendidikan jasmani di SD memahami konsep pengawasan identik dengan penilaian atau inspeksi. Hal ini karena dalam praktik pelaksanaan pengawasannya cenderung menilai dan mengawasi apa yang dikerjakan oleh guru, atau mencari-cari kekurangan dan kesalahan guru. Seringkali kekurangan ini diangkat sebagai temuan. Semakin banyak temuan, maka dianggap semakin berhasil para pengawas tersebut dalam melaksanakan tugasnya.
2. Pelaksanaan pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani di tingkat SD tidak lebih dari hanya sekedar petugas yang sedang menjalankan fungsi administrasi, mengecek apa saja ketentuan yang sudah dilaksanakan dan yang belum. Karena itu, bobot kegiatannya sangat bersifat administratif. Hasil kunjungannya itu kemudian disampaikan sebagai laporan berkala, misalnya bulanan, triwulan atau semesteran, yang ditujukan kepada atasannya.
3. Banyak diantara pengawas yang kurang memahami hakikat dan substansi pendidikan jasmani di SD. Para pengawas tidak paham tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani yang sebenarnya, sehingga saat dimintai untuk memberikan arahan, contoh, bimbingan, serta saran mengalami kesulitan. Kondisi seperti ini paling sering ditemui dalam pelaksanaan pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani di SD.
4. Rasio jumlah pengawas sekolah dan jumlah sekolah secara kuantitatif telah memenuhi ketentuan standar minimal mengenai jumlah sekolah yang harus

diawasi. Pada tahun 2004, jumlah pengawas SD di Kota Bandung sebanyak 75 orang yang tersebar di lima wilayah, yang masing-masing wilayah terdiri dari 5 atau 6 kecamatan dengan rasio rata-rata antara pengawas dengan sekolah adalah 1 : 11. Namun, secara kualitatif bila dikaitkan dengan kondisi geografis wilayah binaan yang sangat beragam, akan mempengaruhi rasio jumlah tersebut. Selain itu, latar belakang pendidikan dan pengalaman jabatan terakhir yang sangat bervariasi, menunjukkan beragamnya kemampuan pengawas SD. Hal tersebut perlu mendapat perhatian para pembina struktural pada tingkat regional, untuk meningkatkan kemampuan para pengawas, terutama yang khusus mengawasi pembelajaran pendidikan jasmani yang hingga kini belum teratasi.

Sejalan dengan hal tersebut perlu adanya kebijakan pemerintah demi terwujudnya pengawas yang bermutu dan kinerja guru pendidikan jasmani yang diharapkan. Dalam pengelolaannya, Dinas Pendidikan Kota Bandung sangat bertanggung jawab terutama dalam hal pembinaan mutu pendidikan. Dalam implementasinya kesemuanya itu akan dipengaruhi oleh penerapan model pengawasan yang dilakukan pengawas pembelajaran pendidikan jasmani di Kota Bandung.

Jadi, isu kritis dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani ini adalah kedudukan guru dalam proses belajar mengajar yang memiliki posisi sentral, sehingga setiap guru pendidikan jasmani perlu mengetahui, memahami, dan menghayati prinsip-prinsip pengawasan. Lebih dari itu, keterampilan dan kiat penerapan prinsip-prinsip proses belajar mengajar (PBM) itu sangat menentukan pencapaian efektivitas pembelajaran pendidikan jasmani. Hyland (1990:53) menjelaskan, "If I asked you to list the characteristics of a good teacher you would

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERPUSTAKAAN

[illegible]ly have little difficulty in doing so." Apabila diminta untuk menetapkan karakteristik seorang guru yang baik, sering mengalami sedikit kesulitan dalam melakukannya. Mengapa demikian? karena banyak variabel yang mendukung terciptanya seorang guru pendidikan jasmani yang berkualitas. Jadi, efektivitas pembelajaran pendidikan jasmani sangat ditentukan oleh kinerja guru. Peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran pendidikan jasmani memerlukan strategi pembinaan yang memadai melalui implementasi model pengawasan yang tepat. Namun, kenyataan di lapangan menggambarkan bahwa pembinaan guru pendidikan jasmani melalui penerapan model pengawasan secara khusus masih jauh dari harapan. Yang sering dilaksanakan justru pembinaan pada guru kelas, sedangkan guru pendidikan jasmani kurang mendapat perhatian serius. Penerapan model pengawasan pada guru oleh pengawas belum terlaksana dengan optimal. Kondisi ini telah menurunkan eksistensi guru pendidikan jasmani sebagai guru bidang studi di tingkat SD.

B. Identifikasi Masalah

Sampai saat ini kinerja guru pendidikan jasmani di SD masih belum memuaskan. Hal tersebut merupakan dampak dari rendahnya mutu pembinaan yang dilakukan pengawas. Berdasarkan hasil observasi ke beberapa SD di Kota Bandung membuktikan bahwa pembinaan guru pendidikan jasmani oleh pengawas cenderung menggunakan model inpeksi. Dari studi pendahuluan yang dilakukan terhadap sejumlah guru pendidikan jasmani SD (N=15) melalui angket ditemukan bahwa:

1. Model pengawasan berupa kunjungan kelas yang dilakukan oleh pengawas masih menitik beratkan pada pembuatan persiapan mengajar, seperti: (a) silabus,

(b) rencana persiapan pembelajaran (RPP), (c) program semester/tahunan, (d) hasil penilaian, dan (e) observasi dalam rangka melihat keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan.

2. Kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas yang dikemukakan oleh sejumlah responden terkesan jarang dilaksanakan sampai tuntas memecahkan masalah proses pembelajaran yang dihadapi guru di lapangan, bahkan sebagian responden mengemukakan pengawasan tidak pernah dilakukan. Selain kedua kondisi tersebut, ditemukan pula bahwa kegiatan pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani yang menitikberatkan pada pembelajaran yang inovatif tidak terjadi, karena pengawas lebih senang menjadi pelaku administrasi sekolah.

Kondisi inilah yang menjadi persoalan pokok sebagai komponen yang menyebabkan rendahnya kinerja guru dalam meraih tujuan pendidikan jasmani yang tertuang dalam kurikulum. Berkaitan dengan isu sentral tersebut, penulis mencoba untuk mengidentifikasi secara khusus model pembinaan melalui pengawasan pada guru pendidikan jasmani agar meningkat kinerjanya. Hal ini dimaksudkan sebagai tanggung jawab profesi dalam proses pembinaan guru agar memiliki kinerja baik dan professional yang pada akhirnya dapat berimplikasi terhadap peningkatan hasil belajar siswa.

Pengawas sekolah mempunyai tanggung jawab dan wewenang terhadap pembinaan kinerja guru secara teratur dan terus menerus termasuk pelaksanaan pengawasan pada mata pelajaran pendidikan jasmani di SD. Menurut Depdikbud (1996:32) bahwa, "Sasaran pelaksanaan supervisi oleh pengawas TK/SD adalah: (a) kepala sekolah, (b) guru, dan (c) guru bidang studi." Jadi, kedudukan pengawas, kepala sekolah, dan guru secara umum merupakan sebuah hirarkis, namun dalam

mekanisme kerja ketiganya dapat saling mengisi satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang hakiki. Gambaran mengenai kedudukan ketiga posisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

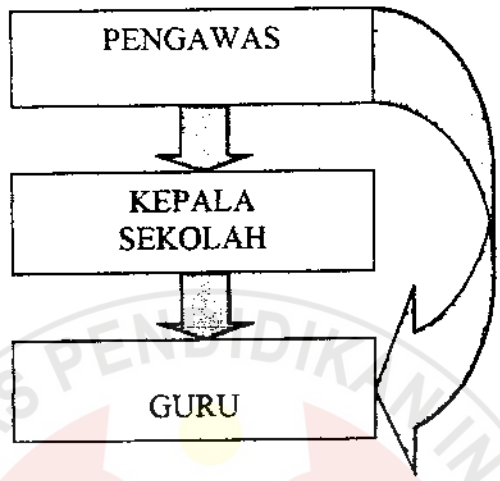

Gambar 1.1

Kedudukan Pelaku dalam Pelaksanaan Pengawasan

Ini merupakan kondisi ideal dari suatu mekanisme pengawasan dalam pendidikan di tingkat SD. Dalam hal pengembangan manajemen sekolah, posisi dan peranan pengawas sekolah adalah sebagai salah satu *stakeholder* pendidikan yang terkait dan terikat erat dengan pengembangan sekolah. Sedangkan dilihat dari misi yang diemban dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional pengawas merupakan salah satu pilar pendidikan yang harus berdiri kokoh bersama dua pilar lainnya yaitu kepala sekolah dan guru dalam menyangga pembangunan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, idealnya pengawas sekolah mampu menjabarkan tugas pokok dan tugas rutin dalam sebuah kerangka pengelolaan strategi pelaksanaan tugas atau manajemen dengan memanfaatkan rentang waktu yang tersedia.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Sugiyanto (2000:178) mengungkapkan bahwa, "Penyelenggaraan supervisi pendidikan jasmani di SD oleh pengawas SD dijumpai belum efektif karena latar belakang pengawas yang bukan dari guru pendidikan jasmani." Jadi jelas masih banyak kesenjangan yang dihadapi dalam pelaksanaan dengan menggunakan model pengawasan oleh pengawas dan kepala sekolah terhadap guru pendidikan jasmani di sekolah dasar, sehingga diperlukan sekali pengawas yang berlatarbelakang guru pendidikan jasmani atau pengawas yang telah dibekali kemampuan dalam bidang pendidikan jasmani. Karena tidak semua orang dapat melakukan pengawasan, maka harus dilakukan secara profesional oleh orang yang profesional. Khususnya untuk pelaksanaan model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani harus pula dilakukan oleh pengawas yang memiliki latar belakang pendidikan (kualifikasi) kepenjasan. Sutjipto dan Mukti (1992:132) menjelaskan bahwa:

> Supervisi pengajaran seharusnya dilakukan oleh seseorang yang dididik khusus dan atau ditugaskan untuk melakukan pekerjaan itu, dengan menggunakan keahlian khusus. Tidak semua orang dapat melakukan supervisi pengajaran. Oleh karena itu dikatakan bahwa supervisi pengajaran merupakan pekerjaan profesional, yang menuntut persyaratan sebagaimana layaknya pekerjaan profesional lainnya. Perbaikan situasi belajar mengajar yang dilakukan oleh orang yang bukan dididik dan ditugaskan untuk melakukan supervisi itu seharusnya tidak dapat dikategorikan ke dalam kegiatan supervisi pengajaran.

Sebagai wujud profesionalisasi pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah. Adapun tugas pengawas sekolah menurut Depdikbud (2000:7) sebagai berikut:

a. Menyusun program pengawasan sekolah;
b. Menilai hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru;
c. Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses belajar mengajar/bimbingan, dan lingkungan sekolah;
d. Menganalisis hasil belajar/bimbingan siswa, guru, dan sumber daya pendidikan;
e. Melaksanakan pembinaan kepada guru dan tenaga lainnya di sekolah;
f. Menyusun laporan dan evaluasi hasil pengawasan;
g. Melaksanakan pembinaan lainnya di sekolah selain proses belajar mengajar/bimbingan siswa;
h. Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan dari seluruh sekolah yang ada di lingkungan Kabupaten/Kota.

Namun, kenyataan di lapangan pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan model yang tepat belum dilakukan. Apalagi yang berkaitan dengan pembinaan yang ditujukan pada perbaikan sikap, keterampilan maupun nilai-nilai guru pendidikan jasmani. Seorang guru yang jarang mendapat pengawasan dari pengawas, tentunya guru tersebut kurang mendapat pembinaan profesional. Implikasi yang lebih besar, guru pendidikan jasmani menjadi terlena dan terbenam di dalam rutinitas kerja tanpa ada upaya perbaikan dalam meningkatkan kinerjanya, karena pelaksanaan pengawasan sangat lemah dari manajemen sekolah dan pemerintah.

Secara umum permasalahan mengenai pelaksanaan model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani saat ini di Kota Bandung dapat diidentifikasi menjadi beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Belum adanya pedoman (*guidelines*) yang baku untuk digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani SD, sehingga pengawas dalam menjalankan tugasnya di lapangan menjadi tidak terpola secara apik. Mengacu pada SK Mendikbud Nomor 020/U/1998 bahwa pengawasan untuk mata pelajaran pendidikan jasmani di SD menjadi tanggung jawab dari pengawas sekolah.

Padahal untuk pembelajaran pendidikan jasmani, pedoman pengawasan sangat khas dan tidak dapat disamakan dengan mata-mata pelajaran lainnya.

2. Sampai saat ini masih dirasakan keterbatasan personil yang layak memangku tugas dan peran sebagai pengawas (supervisor) pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Keterbatasan personi tersebut disebabkan oleh sistem birokrasi yang kurang mendukung. Selain itu, jenjang karir pengawas pendidikan pada umumnya dan pengawas pendidikan jasmani khususnya, harus melalui jenjang karir Kepala Sekolah terlebih dahulu.
3. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2005 tercatat sebanyak 7903 orang yang terdiri dari guru kelas, guru pendidikan jasmani, dan guru agama. Jadi rasio pengawas dengan guru adalah 1 : 105, jelas kondisi ini sangat tidak memadai manakala pengawas harus mengawasi guru sebanyak itu dalam berbagai ragam mata pelajaran, termasuk pendidikan jasmani yang memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya di sekolah dasar. Kondisi pengawas pendidikan ini dijelaskan oleh Furqon (2006) dalam harian umum "PR" 9 Oktober 2006 hal 17 bahwa, "Kurangnya tenaga pengawas pendidikan menjadi salah satu masalah rendahnya mutu pendidikan di Indonesia."
4. Kurangnya keprofesionalan para pelaksana pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah saat ini, ditandai dengan kurangnya pemahaman para pengawas dalam mata pelajaran pendidikan jasmani sebagai bidang tugas yang harus dilakukannya. Lemahnya kompetensi yang dimiliki oleh para pengawas yang ada, mengakibatkan corak dan gayanya seolah-olah seperti "inspeksi", hanya mencari-cari kesalahan para guru pendidikan jasmani

pada setiap kali kunjungan. Kondisi seperti ini, tidak mustahil akan berakibat lahirnya masalah baru pula, terutama dalam hal kerenggangan hubungan manusiawi antara para guru pendidikan jasmani, kepala sekolah dan pengawas itu sendiri. Kualitas pembelajaran tentu akan semakin rendah, karena tidak terjadi peningkatan dan perbaikan mutu yang diharapkan. Untuk meningkatkan dan menciptakan profesionalisasi dalam bidang ini, adalah melalui program pendidikan dan latihan yang dirancang khusus untuk keperluan itu.

5. Sudah menjadi konsekuensi logis bagi penyiapan tenaga-tenaga pengawas yang berkualitas dan profesional, ialah harus menyediakan sistem dan lembaga pendidikan khusus untuk menyiapkan tenaga-tenaga pengawas yang layak dan profesional. Sepanjang sistem dan lembaga pendidikan yang secara khusus bertugas menyiapkan tenaga-tenaga profesional di bidang supervisi pendidikan jasmani ini belum ada, maka sukar diperoleh tenaga-tenaga pengawas yang bertugas secara profesional. Apa yang dirasakan di sekolah-sekolah saat ini para pengawas belum dapat menjalankan tugas pokok manajemen yang terdiri atas: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan; dan (3) penilaian/evaluasi sebagai tahapan suatu kegiatan. Seyogiannya dapat diterapkan para pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas rutin di lingkungan kerja masing-masing. Dari 75 orang pengawas TK/SD/SDLB yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Bandung, 100% pengawas tidak memiliki latar belakang keilmuan pendidikan jasmani dan olahraga. Dalam harian umum "PR" 9 Oktober 2006 hal 17 Furqon menjelaskan bahwa, "Masih ditemukan tenaga pengawas yang tidak menguasai substansi." Di samping itu, corak supervisi yang dianutpun masih bersifat "inspeksi", masih mencari-cari kesalahan para guru pendidikan jasmani yang

tengah mengalami kesulitan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional para pengawas harus merupakan suatu keniscayaan. Lebih jauh dari itu, pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani harus juga dipandang sebagai suatu profesi.

6. Terkait dengan kedua persoalan di atas, masalah pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani saat ini kurang didukung oleh bidang keilmuan terkait. Misalnya, seorang pengawas dalam mata pelajaran pendidikan jasmani harus memiliki latar belakang keilmuan tentang pendidikan jasmani dan olahraga, di samping ilmu-ilmu pendukung lainnya, seperti psikologi, teori belajar, teori kepribadian, pedagogi, manajemen, sosiologi, teori organisasi, ilmu komunikasi, teori dinamika kelompok, dan lain sebagainya. Dengan demikian, seorang pengawas yang profesional dapat terwujud. Pengalaman menunjukkan masih banyak para pengawas sebagai pemangku tugas dan peran dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, justru kurang memahami secara baik ilmu pendukung utama, seperti pendidikan jasmani dan olahraga.

Penggunaan model pengawasan selama ini belum mendukung terhadap tugas pengawas. Tugas pengawas sebagai pembina profesional yang diberi wewenang penuh oleh kepala dinas pendidikan dalam mengontrol kualitas pembelajaran belum berjalan optimal. Data menunjukkan bahwa 80% guru pendidikan jasmani di Kota Bandung masih belum merasakan secara langsung pembinaan yang diberikan oleh pengawas, seperti bagaimana menggunakan metode dan teknik mengajar yang tepat? Untuk efektifitas dan efisiensinya proses pembinaan perlu dilakukan secara terus menerus (*continuous improvement*) dengan struktur organisasi pembina

menggunakan struktur yang telah ada. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandung (2002) menetapkan struktur organisasi sebagai berikut:

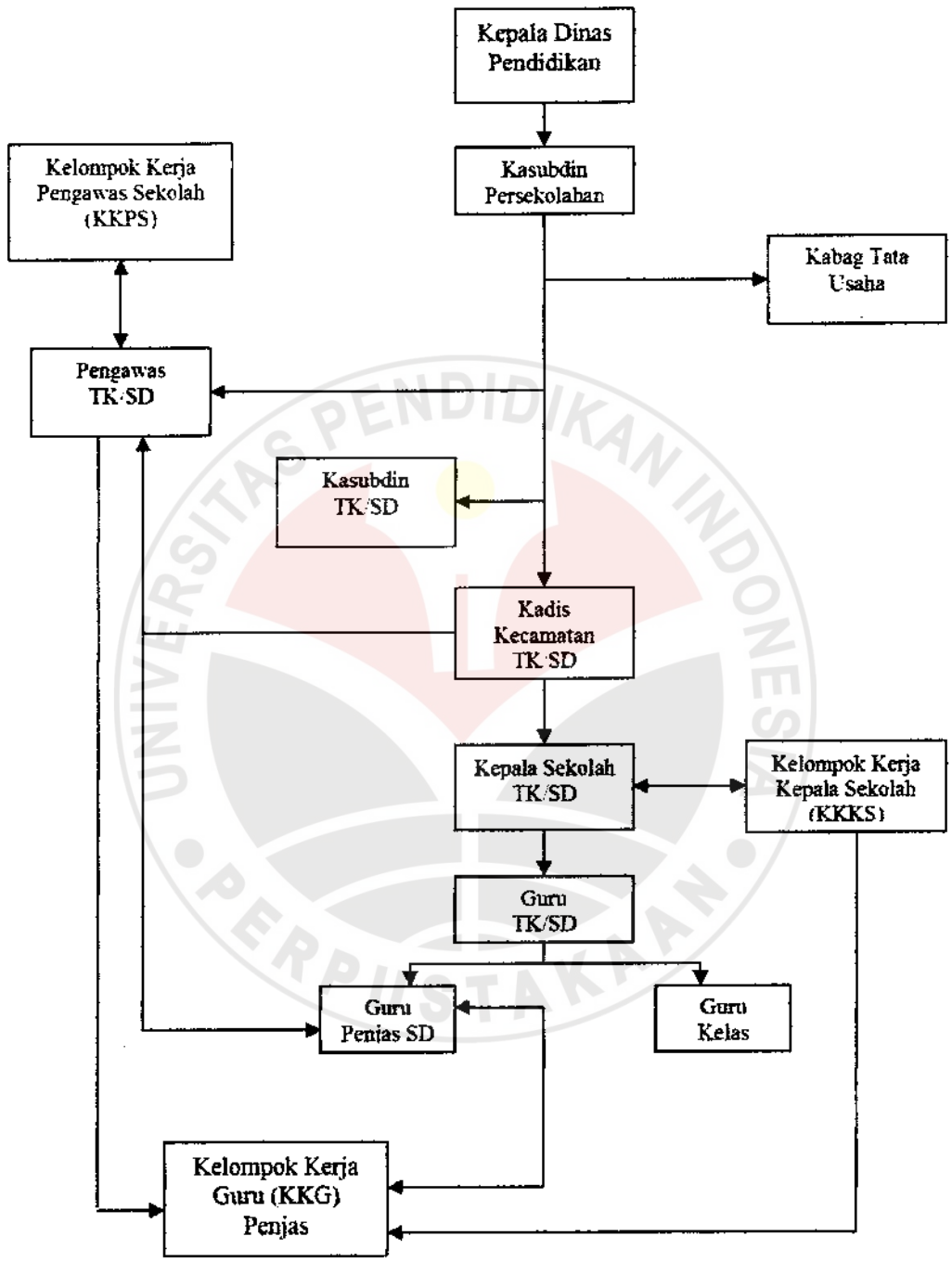

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Pembinaan Guru
(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2006)

Struktur di atas menggambarkan bahwa tugas utama dimulai dari kepala dinas pendidikan hingga struktur yang paling bawah yaitu sekolah. Proses pembinaan ada yang bersifat vertikal dan horizontal. Pembinaan vertikal merupakan kegiatan pembinaan kepala dinas kepada pengawas dan kepala sekolah. Sedangkan pembinaan horizontal merupakan pembinaan guru untuk guru pada wadah KKG (Kelompok Kerja Guru). Di tingkat SD terdapat beberapa KKG diantaranya guru kelas, guru agama, guru kesenian, dan guru pendidikan jasmani.

Berdasarkan persoalan di atas, perlu dikembangkan model pengawasan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemandirian guru serta dapat meningkatkan inisiatif dengan melakukan evaluasi diri (*self evaluation*) dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan jasmani di SD. Model yang dikembangkan adalah model pengawasan yang berbasis pada sekolah dengan memperhatikan sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia di sekolah. Pelaksanaan pengawasan sekolah yang berlangsung saat ini (2006-2007) dikembangkan dengan cara dimodifikasi sesuai dengan kondisi obyektif sekolah dasar di Kota Bandung. Pelaksanaan pengawasan pengawas saat ini belum memberikan hasil yang signifikan terutama dalam hal kinerja guru pendidikan jasmani. Hal tersebut dapat dimengerti karena pembinaan guru pendidikan jasmani selama ini masih bersifat administratif dan tidak menukik ke aspek subtantif. Keputusan tentang praktek pengawasan yang dijadikan target dalam menampilkan pembelajaran sangat diperlukan. Selama ini penguasaan materi pendidikan jasmani cenderung bersifat akumulatif dan mengarah pada kemampuan psikomotor. Oleh karena itu model pengawasan pembelajaran yang dikembangkan diharapkan dapat

mempengaruhi cara mengajar guru pendidikan jasmani yang menekankan pada kompetensi dasar, terutama dalam mencapai standar kompetensi lulusan.

Model pengawasan yang akan dikembangkan merupakan suatu model pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja guru pendidikan jasmani yang berorientasi pada prinsip-prinsip manajemen mutu pembelajaran, sehingga perlu dikaji melalui suatu rangkaian penelitian. Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: (1) mengkaji pelaksanaan pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani yang sedang berlangsung saat ini dan mengaitkan dengan unsur-unsur yang dikembangkan, (2) menjaring, menganalisis, dan merumuskan model pengawasan sekolah berdasarkan unsur-unsur dalam pembelajaran sebagai model yang efektif, dan (3) menguji signifikansi dan efektivitas model yang telah dirumuskan itu.

C. Perumusan Masalah

Pengembangan model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani dengan sasaran akhir terwujudnya kinerja guru pendidikan jasmani yang profesional dan hasil belajar siswa. Model pengawasan berupa pembinaan guru dimaksudkan sebagai suatu sistem dalam konteks manajemen sumber daya manusia (SDM), khususnya pengembangan pengawas, kepala sekolah, dan guru pendidikan jasmani.

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah pokok adalah: "Bagaimanakah mengembangkan model pengawasan pembelajaran yang dapat meningkatkan kinerja guru pendidikan jasmani di SD?" Model pembinaan yang disarankan untuk dikembangkan adalah model pengawasan saat ini yang dimodifikasi menjadi model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani.

Secara spesifik rumusan masalah ini ditetapkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani saat ini yang dilaksanakan oleh pengawas dikaitkan dengan tugas pokok pengawas sekolah?
   a. Bagaimana pemahaman kepala sekolah dan pengawas terhadap peranannya sebagai pengawas pembelajaran pendidikan jasmani di SD?
   b. Bagaimana pemahaman guru pendidikan jasmani terhadap peranan kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai pengawas pengajaran?
   c. Bagaimana sifat hubungan antara guru pendidikan jasmani dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam kaitannya dengan upaya memperbaiki pembelajaran pendidikan jasmani di SD?
   d. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai pengawas pengajaran dalam upaya memperbaiki pembelajaran pendidikan jasmani di SD?
   e. Format instrumen pengawasan sekolah mata pelajaran pendidikan jasmani SD seperti apa yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan saat ini oleh pengawas sekolah?
2. Unsur-unsur pengembangan pengawasan apa saja menurut tugas pokok dalam pembelajaran pendidikan jasmani di SD?
3. Seberapa besar efektivitas model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani di SD yang seharusnya dikembangkan?
   a. Berapa besar efektivitas model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani yang dikembangkan terhadap kinerja guru pendidikan jasmani SD?

b. Berapa besar efektivitas model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani yang dikembangkan terhadap hasil belajar pendidikan jasmani pada siswa SD?

Ketiga rumusan masalah di atas menjadi fokus dalam pengembangan suatu model pengawasan yang dapat memotivasi para guru pendidikan jasmani di SD untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani saat ini yang dilaksanakan oleh pengawas; (2) unsur-unsur pengembangan pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani, dan (3) efektivitas model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani.

Secara lebih spesifik tujuan penelitian adalah untuk memperoleh temuan baru mengenai pengembangan model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani di SD, terutama hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani saat ini yang dilaksanakan oleh pengawas dikaitkan dengan tugas pokok pengawas.
2. Mempelajari unsur-unsur model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani SD yang dikembangkan menurut manajemen mutu.
3. Mempelajari efektivitas model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani SD yang dikembangkan sejalan dengan manajemen mutu dilihat dari kinerja guru pendidikan jasmani dan hasil belajar siswa.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah konsep administrasi pendidikan, khususnya tentang konsep pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap makna-makna baru yang dapat diangkat, sehingga dapat dijadikan wawasan dalam pelaksanaan pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani di SD. Secara spesifik manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk dijadikan pedoman bagi pengelola dan pimpinan lembaga pendidikan dalam menentukan arah pengambilan keputusan, serta untuk dijadikan prioritas dalam membuat strategi yang dianggap paling menguntungkan untuk peningkatan kinerja guru pendidikan jasmani di SD. Terutama dalam mengkaji substansi pengembangan sumber daya manusia, khususnya manajemen SDM guru dan memperkaya bidang akademik tentang model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani.
2. Untuk dijadikan bahan masukan berupa model pengawasan dalam pembinaan SDM guru pendidikan jasmani yang tepat oleh FPOK-UPI dan PGSD-S1 Pendidikan Jasmani UPI dan LPTK lainnya dalam rangka mempersiapkan guru pendidikan jasmani yang lebih profesional di tingkat SD.
3. Untuk dijadikan bahan perbandingan oleh LPMP dalam pengembangan program pembinaan SDM guru pendidikan jasmani di SD. Terutama dalam memberikan masukan kepada LPMP dalam menyusun program dan implementasi program berupa kegiatan penataran-penataran serta pelatihan-pelatihan yang melibatkan para guru pendidikan jasmani, khususnya yang

berkaitan dengan model pengawasan dalam pembinaan guru pendidikan jasmani yang lebih profesional pada tingkat SD.

F. Premis Penelitian

Premis merupakan titik tolak pemikiran yang akan memberikan batasan-batasan dalam keseluruhan proses penelitian ini. Rumusan premis tersebut nantinya dapat membantu peneliti dalam memberi arah terhadap kesimpulan yang akan diambil. Dalam hal ini penulis mengamati mengenai perlunya analisis terhadap kecenderungan pelaksanaan model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani yang ada saat ini dan melakukan pengembangan model pengawasan yang dapat meningkatkan kinerja guru pendidikan jasmani di SD. Model perbaikan pada komponen sistem pendidikan ini sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar. Dengan upaya yang terus-menerus, bertahap, berkelanjutan, dan dilakukan oleh semua bagian menjadi langkah besar menuju manajemen mutu. Seperti yang disampaikan Manap (1999) bahwa, "Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus adalah konsep dasar dari *Total Quality Management dan Learning Organization*."

Adapun premis yang melandasi penelitian mengenai model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani sebagai berikut:

1. Banyak hal yang dapat dilakukan institusi guna meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan jasmani di SD adalah perlunya dilakukan intervensi sistematis. Manap (1999) memaparkan bahwa, "Salah satu upaya intervensi sistematis adalah melalui peningkatan supervisi pengajaran oleh pengawas sekolah sebagai *supervisor* pendidikan." Pengawas sekolah memiliki peran yang luar biasa, yaitu: memberikan arahan,

membimbing, memberikan contoh, dan menyampaikan saran dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Tugas pengawas yang demikian berat menuntut pengawas sekolah untuk ditingkatkan kemampuannya. Pada akhirnya, hal tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya kinerja guru pendidikan jasmani SD ke arah yang lebih baik.

2. Melalui pengawasan pembelajaran, pengawas akan mampu mempengaruhi perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana proses pembelajaran. Dalam hal ini Alfonso, *et al.* (1981:43) menjelaskan bahwa, "Instructional supervision is herein defined as behavior officially designated by the organization that directly affects teacher behavior in such a way as to facilitate pupil learning and achieve the goals of the organization." Pengawasan pembelajaran sebagai upaya yang dilakukan lembaga yang secara langsung memberi pengaruh terhadap perilaku para guru untuk memfasilitasi belajar siswa dan meraih tujuan pendidikan. Demikian pula halnya dengan guru pendidikan jasmani, kinerjanya akan meningkat manakala pelaksanaan supervisi pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien.

3. Agar kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas berjalan efektif, maka perlu diperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaannya. Aspek utama yang mempengaruhi efektivitas pelayanan pengawasan pembelajaran adalah aspek kemampuan profesional pengawas. Menurut Dharma (2003:16) bahwa, "Supervisor yang efektif memimpin bawahannya untuk menimbulkan dampak yang positif terhadap hasil dan kinerja." Kinerja berupa pengetahuan, kemampuan interpersonal, dan keterampilan teknis. Oleh karena itu, tuntutan untuk melakukan upaya peningkatan kemampuan

profesional para pengawas sekolah perlu segera dilakukan. Melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia, seperti pendidikan dan pelatihan secara sistematis, dapat mewujudkan pengawas sekolah yang lebih handal dan berkualitas. Manajemen sumber daya manusia adalah fungsi dan aktivitas manajemen dalam suatu organisasi yang ditandai dengan pengakuan akan pentingnya tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang vital dan berkontribusi terhadap tujuan. Jadi, pembinaan dan rekrutmen pengawas sekolah harus mengacu pada struktur tugas dan bukan pada kepentingan individu atau kelompok.

4. Pengawasan ini dirancang untuk membantu para guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar di sekolah. Sergiovanni dan Starratt (1993:37), secara umum merumuskan bahwa, "Supervision is a process designed to help teachers and supervisors learn more about their practice; to be better able to use their knowledge and skills to better serve parents and schools; and to make the school a more effective learning community." Maknanya, supervisi merupakan suatu proses yang dirancang untuk membantu guru-guru dan para supervisor untuk lebih mempelajari tentang praktik yang mereka lakukan; untuk menjadi lebih mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka, agar lebih baik melayani para orang tua dan sekolah-sekolah; dan membuat sekolah menjadi suatu masyarakat belajar lebih efektif. Dalam konteks supervisi pendidikan jasmani pada prinsipnya tiada lain merupakan suatu upaya yang dirancang untuk membantu para guru pendidikan jasmani dalam meningkatkan dan memperbaiki kualitas pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Secara konseptual, supervisi pendidikan

jasmani merupakan serangkaian kegiatan membantu dan mendorong atau merangsang para guru pendidikan jasmani dalam mengembangkan kemampuan profesional mereka, terutama dalam mengelola proses belajar mengajar untuk pencapaian tujuan pendidikan jasmani itu sendiri dan tujuan pendidikan secara keseluruhan.

5. Terkait dengan hakekat supervisi pemikiran dari Rusli Lutan, dkk. (2002:114) bahwa, "Esensi supervisi pendidikan jasmani itu sama sekali bukan semata-mata menilai kinerja para guru pendidikan jasmani dalam mengelola proses belajar-mengajarnya di sekolah." Namun, justru berusaha mencarikan upaya yang dapat dilakukan untuk membantu dan mendorong, serta menfasilitasi para guru pendidikan jasmani, agar mampu mengembangkan kemampuannya.
6. Fenomena yang muncul dalam penelitian ini berawal dari kondisi guru yang kurang menggembirakan yang dijelaskan oleh Dedi Supriadi dan Fasli Jalal (2001:300) bahwa, "Keadaan guru yang tidak berdaya dan dalam posisi lemah sedikitnya pada empat hal, yaitu sebagai berikut: (1) ketidakberdayaan dalam karir; (2) ketidakberdayaan dalam kemampuan, (3) Ketidakberdayaan psikologis, dan (4) ketidakberdayaan dalam kesejahteraan." Padahal guru secara profesional menempati titik sentral dan memegang peranan sangat penting dalam proses pendidikan. Bahkan pada masa mendatang peranan guru akan semakin bertambah luas yakni sebagai agen kognitif, moral, politik, inovator, kooperatif, persamaan sosial dan pendidikan. Peranan ini harus dimulai dari tingkat pendidikan SD dan untuk setiap guru, baik guru kelas maupun guru bidang studi seperti pendidikan jasmani. Kondisi tersebut mengharuskan adanya upaya sungguh-sungguh dengan memberikan pembinaan bagi para guru agar

diperoleh peningkatan efektivitas dan produktivitas pendidikan yang diharapkan.

7. Menurut Rusli Lutan, dkk. (2002:115) menjelaskan lima konsep yang terkandung dalam supervisi penjas, yaitu: (a) supervisi secara langsung mempengaruhi dan mengembangkan kinerja guru, (b) supervisi adalah membantu guru mengembangkan kemampuan profesional dan moralnya, (c) supervisi adalah tanggung jawab bersama antara pengawas sekolah dan guru, (d) tujuan supervisi adalah agar guru profesional dan bermoral, (e) supervisi sebagai suatu profesi harus didukung oleh latar belakang keilmuan.

G. Alur Pikir Penelitian

Mengacu pada sejumlah premis penelitian yang telah diuraikan di atas, maka alur pikir yang ditampilkan oleh peneliti dalam mengamati atau memahami pengembangan model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani dalam meningkatkan kinerja guru. Pengembangan model ini adalah mengubah pelaksanaan pengawasan dari mencari kesalahan guru menjadi pembina guru pendidikan jasmani. Pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani bukan melakukan inspeksi terhadap guru di sekolah, namun bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pembelajarannya, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas perilaku para siswanya. Adapun alur pikir penelitian yang dimunculkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

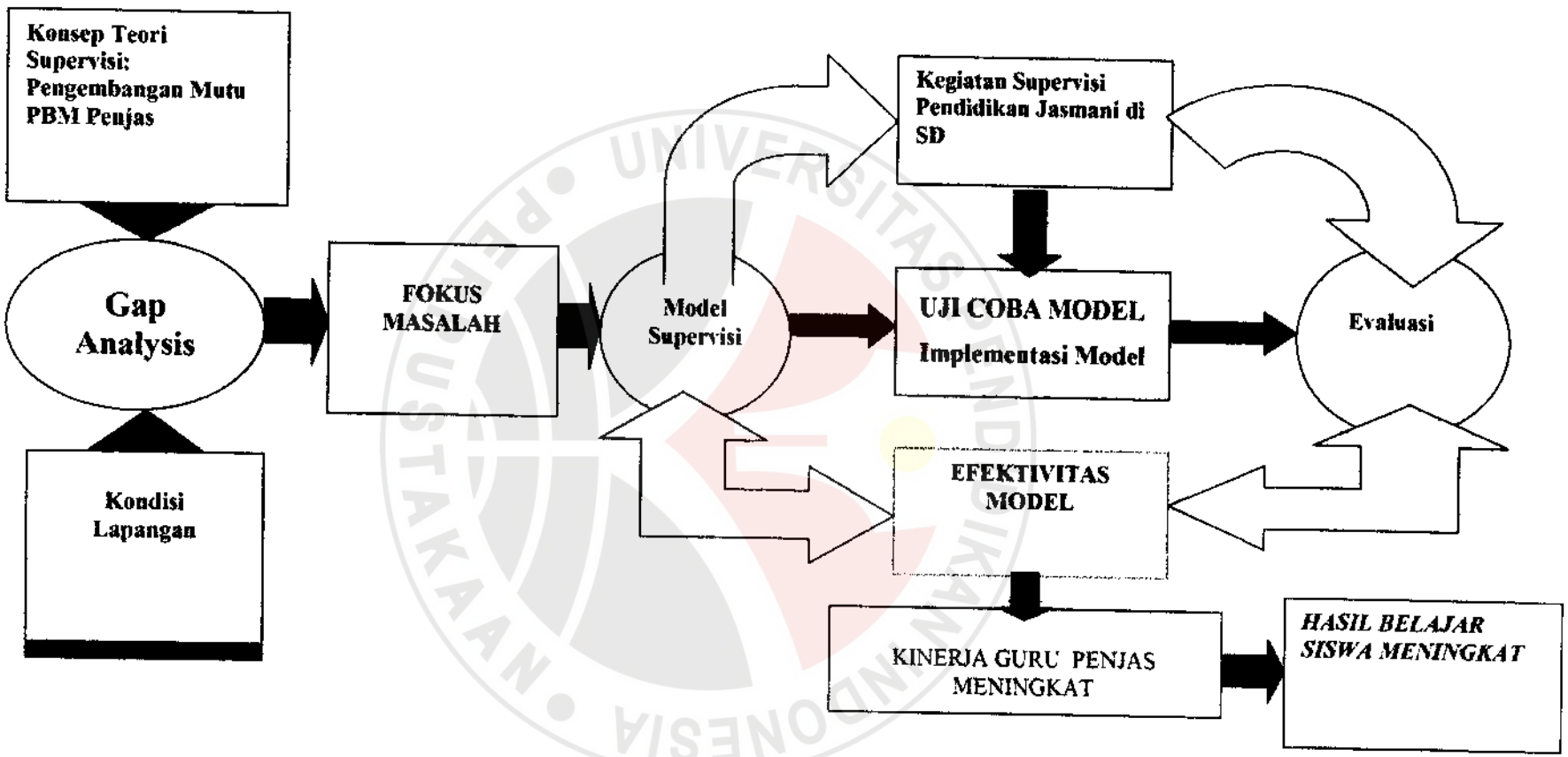

Gambar 1.3

Alur Fikir Penelitian Pengembangan Model Supervisi Pembelajaran Pendidikan Jasmani SD

1. Konsep Dasar Pengawasan Pembelajaran Pendidikan Jasmani

Pengawasan pembelajaran secara konseptual dimaknai sebagai upaya membina guru agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan pengawasan seharusnya: (a) menjadi bagian integral dari program pendidikan yang bersifat kerjasama; (b) semua guru memerlukan dan berhak atas bantuan pengawasan; (c) disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perseorangan dan personil sekolah; (d) membantu menjelaskan tujuan-tujuan pendidikan dan implikasinya; (e) membantu memperbaiki sikap dan hubungan dari semua anggota staf sekolah dan hendaknya membantu dalam pengembangan hubungan sekolah dan masyarakat; (f) tanggung jawab dalam pengembangan program supervisi berada pada pengawas dan kepala sekolah; dan (g) membantu menjelaskan dan menerapkan dalam praktek penemuan penelitian pendidikan yang mutakhir.

Menurut Sagala (2006:238), "Supervisi harus dilaksanakan secara konstruktif dan kreatif, yaitu mendorong inisiatif untuk ikut aktif menciptakan suasana kondusif yang dapat membangkitkan suasana kreatif." Pengawasan dilaksanakan secara kooperatif dengan mengembangkan usaha bersama menciptakan suasana belajar mengajar yang lebih baik berdasarkan sumber kolektif dari kelompok, daripada usaha-usaha supervisor sendiri menunjukkan profesionalitas bukan atas hubungan pribadi. Pengawasan juga harus progresif, berani melangkah maju, dilaksanakan bertahap didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya serta mendapat dukungan dari pihak eksekutif dan legislatif.

Jadi, secara konseptual pelaksanaan pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani di SD seharusnya lebih memberdayakan guru mulai dari tahap persiapan

pengajaran, proses pelaksanaan pengajaran, hingga penilaian pengajaran. Melalui pola kolaborasi dan kooperasi dalam pelaksanaan pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani di SD akan dapat membantu guru meningkatkan kemampuannya agar menjadi guru yang lebih baik dalam melaksanakan pengajarannya.

2. Kondisi Lapangan

Pada kenyataan di lapangan pelaksanaan pengawasan masih bersifat inpeksi. Membantu guru dalam memperbaiki cara mengajarnya bukan menjadi perhatian utama, guru cenderung resah dan takut apabila diawasi. Selain itu juga, kepentingan dan kebutuhan pengawasan bukan muncul dari para guru, melainkan keinginan pengawas itu sendiri dalam menjalankan tugasnya.

Pengawas sendiri sering kali tidak tahu apa yang akan diamati dan dinilai dari pembelajaran pendidikan jasmani, sedangkan guru juga tidak mempunyai pengetahuan apa yang diamati dan dinilai pengawas. Akibatnya data pengamatan menjadi tidak sistematis dan bersifat subyektif bahkan cenderung tidak jelas, karena tidak jelasnya pelaksanaan pengawasan inilah sering kali guru pendidikan jasmani merasa tidak perlu disupervisi meskipun hal itu merupakan bagian dari proses pendidikan dan pekerjaan pengawas.

Jadi, pelaksanaan pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani di SD belum secara optimal ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harus memperhatikan prosedur pelaksanaannya yang sesuai dengan konsep dan teori pengawasan. Kondisi lapangan yang ada saat ini masih belum memberikan kontribusi signifikan dalam perbaikan pembelajaran. Kondisi lapangan itu sendiri sering kali dilematis antara

kepentingan birokrasi dan perbaikan pembelajaran. Padahal pengawasan yang baik dapat meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran yang lebih baik pula.

3. Analisis Gap

Beberapa permasalahan yang dihadapi guru pendidikan jasmani dalam pelaksanaan pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani di SD dapat dilihat dari beberapa hal: (a) latar belakang pendidikan, (b) keterampilan, (c) kesanggupan jasmani, (d) kondisi psikologis, dan (e) pengalaman mengajar. Perbedaan ini sering memunculkan kesenjangan dalam pelaksanaan pengawasan pembelajaran. Pengawas umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan jasmani, sehingga akan mengalami kesulitan manakala harus mengoreksi dan memberikan contoh cara mengajar pendidikan jasmani yang benar.

Suatu studi yang dilaksanakan oleh A.W. Sturges (1978) yang dikutip Sagala (2006:234) menjelaskan, "Adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pelaksanaan supervisi." Dilihat dari sifat dan tujuan pengawasan seharusnya membantu dalam perbaikan pengajaran, namun kenyataannya pengawas lebih menekankan pada tanggung jawab administratif guru pendidikan jasmani. Dengan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan konsep hasilnya membuktikan dalam pelaksanaan pengawasan antara teori dan kondisi lapangan belum ada kesesuaian.

4. Fokus Penelitian

Mengacu pada analisis kesenjangan di atas, maka masalah penelitian ini difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

a. Pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani harus demokratis. Artinya, seorang pengawas harus melibatkan para guru pendidikan jasmani secara aktif, terutama dalam penyusunan program dan pengambilan keputusan. Tanggung jawab perbaikan program pengajaran tidak hanya terletak pada pengawas semata, tetapi juga pada guru itu sendiri. Pengawas tidak boleh mendominasi dalam pelaksanaan pengawasan, karena penekanannya yang demokratis adalah kooperatif dan aktif. Oleh karena itu, program pengawasan pendidikan jasmani sebaiknya direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakan bersama-sama secara kooperatif dengan guru. Kepala sekolah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaannya harus berada di bawah koordinasi pengawas sekolah.

b. Program pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani harus merupakan bagian integral dalam program pendidikan secara keseluruhan, sejalan dengan hakikatnya yang merupakan bagian integral dari keseluruhan upaya pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan dari pengawasannya harus sama dengan tujuan pengawasan pada umumnya, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Di dalam setiap organisasi persekolahan dan organisasi pendidikan pada umumnya, terdapat bermacam-macam sistem perilaku dengan tujuan yang sama, yaitu terarah pada tujuan pendidikan. Sistem perilaku yang dimaksud antara lain: sistem perilaku administratif, sistem perilaku pengajaran, termasuk pengajaran pendidikan jasmani, sistem perilaku kesiswaan, sistem perilaku pengembangan bimbingan dan konseling, dan sistem pengawasan pengajaran. Antara satu sistem perilaku dengan sistem perilaku lainnya merupakan satu kesatuan yang integral, dan saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan

tersebut harus dilakukan secara integral pula. Jadi, dengan demikian, upaya untuk mewujudkan prinsip ini diperlukan hubungan yang baik dan harmonis antara pengawas dengan semua pihak pelaksana program pendidikan lainnya, terlebih-lebih dengan guru-guru pendidikan jasmani di SD.

c. Pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani hendaknya bersifat komprehensif. Artinya program pengawasan harus mencakup keseluruhan aspek pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani. Mulai dari penetapan tujuan, perencanaan program, pemilihan materi kegiatan pembelajaran, pelaksanaan PBM, sampai pada evaluasi dan pengembangan serta peningkatan kualitas pendidikan jasmani lebih lanjut. Meskipun mungkin ada penekanan tertentu terhadap satu atau dua aspek yang berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan sebelumnya.

d. Pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani harus bersifat konstruktif. Artinya pengawasan itu bukanlah untuk mencari-cari kesalahan bawahan dan juga bukan melakukan inspeksi terhadap program dan guru pendidikan jasmani di sekolah, namun bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas perilaku para siswanya. Meskipun dalam proses pelaksanaan pengawasan tidak lepas dari penilaian kinerja para guru, namun pada prinsipnya bertujuan untuk pengendalian mutu, memotivasi guru-guru itu sendiri, karena pengawas itu sendiri merupakan suatu profesi yang harus dikembangkan terus menerus.

e. Pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani harus bersifat obyektif. Artinya dalam penyusunan program, pelaksanaan, dan mengevaluasi keberhasilan

program pendidikan jasmani di sekolah, maka pengawasan harus obyektif. Pengawas sekolah tidak boleh hanya menerima informasi sepintas, seperti: isyu, gosip, atau fitnah dari mulut ke mulut saja. Ini berarti penyusunan program dan pelaksanaan program pengawasan harus didasarkan pada data, fakta, dan kenyataan, serta kebutuhan riil yang terjadi di lapangan. Begitu pula dalam mengevaluasi keberhasilan program pengawasan, dan pengembangan profesional guru pendidikan jasmani, harus berdasarkan data yang obyektif, terhindar dari perasaan subyektif, karena kebencian, dendam, dan bujukan orang lain. Di sinilah letak pentingnya asesmen (penilaian) informasi yang akurat dan instrumen pengukur dan pengumpul data yang valid dan reliabel untuk memperoleh sebuah gambaran obyektif tentang kemampuan profesional guru, terutama dalam hal manajemen PBM pendidikan jasmani di SD.

f. Pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani harus dilakukan secara berkesinambungan. Maksudnya bahwa pelaksanaan pengawasan ini bukan berarti merupakan tugas sambil lalu, atau sewaktu-waktu, bila ada waktu dan kesempatan, tetapi harus dilakukan secara terus menerus. Logikanya adalah munculnya masalah-masalah dalam pendidikan akan selalu terjadi, sejalan dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya, IPTEK, sebagai akibat derasnya arus informasi dan komunikasi global dan lokal. Oleh karena itu, tugas pengawasan merupakan tugas dan fungsi yang esensial dalam keseluruhan program pendidikan pada umumnya dan program persekolahan pada khususnya. Ketika guru pendidikan jasmani telah berhasil mengembangkan dirinya sebagai seorang profesional, bukan berarti selesailah tugas pengawas, numun harus secara terus menerus dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan.

g. Pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani harus mampu menciptakan hubungan manusiawi yang harmonis. Hubungan manusiawi hendaknya dijalin tidak hanya antara pengawas sekolah dengan guru saja, tetapi harus juga dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan program dan pelaksanaan pengawasan tersebut. Oleh karena itu, hubungan manusiawi yang diciptakan hendaknya bersifat terbuka, lebih mementingkan kesetiakawanan, dan informasi. Ini berarti seorang pengawas dilihat dari karakteristik kepribadiannya harus memiliki sifat-sifat: senang membantu, dan memahami orang lain, terbuka, jujur, tulus, sabar, antusias, dapat dipercaya, dan penuh humor.

h. Pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani hendaknya dapat menerapkan asumsi-asumsi pengawasan SDM dan sekaligus pula pengawasan hubungan manusiawi. Penerapan gabungan dari kedua pelaksanaan pengawasan tersebut, diharapkan lahir model pengawasan yang bersifat normatif dan profesional.

i. Pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani hendaknya didasarkan atas filsafat dan ilmu pengetahuan, dengan menggunakan metode dan sikap ilmiah, sepanjang metode dan sikap ilmiah itu dapat digunakan. Metode dan sikap ilmiah ini amat penting untuk memahami gejala dan proses dinamika dan perubahan sosial yang terjadi dalam pembelajaran pendidikan jasmani.

Kesembilan permasalahan yang telah diuraikan di atas menjadi pokok persoalan yang ingin penulis tampilkan menjadi sebuah langkah dalam melakukan pengembangan model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani yang hingga kini belum berwujud secara normatif oleh pemerintah dan dapat dilaksanakan selama proses pengawasan baik oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru pendidikan jasmani di SD.

H. Definisi Operasional

Untuk tidak terjadi penafsiran yang keliru mengenai persoalan yang muncul dalam penelitian ini, penulis mencoba memaparkan secara lebih operasional yang menyangkut hal-hal penting yang tertuang dalam disertasi ini sebagai berikut:

1. Abin Syamsudin (2000:7) memaparkan bahwa, "Model adalah pedoman melakukan aksi, memiliki sifat sangat dibutuhkan, pengaruhnya mampu menembus dalam arti mewarnai berbagai keputusan pelaksanaan, dan sangat besar pengaruhnya terhadap keseluruhan organisasi." Menurut Dunkin dan Biddle (1974:2) Model adalah, "To guide the study of teaching and learning." Dalam penelitian ini model merupakan sesuatu contoh yang dapat dihasilkan atau dikembangkan dalam pelaksanaan pengawasan.
2. Dalam penelitian ini yang dimaksud pengembangan adalah suatu perubahan dari yang sudah ada dan sedang dilaksanakan yang melibatkan berbagai aspek. Nilai-nilai yang didapat dari pengembangan pada model yang akan dicobakan ke depan antara lain mendapatkan: sebuah model pengawaan yang lebih bermakna dan memberikan perubahan berarti.
3. Menurut Harahap (2004:16) pengertian pengawasan adalah, "Keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang *supervisor* untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan di dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya untuk mencapai keseluruhan visi, misi dan tujuan organisasi." Sedangkan Bucher dan Krotee (2002:238) paparkan bahwa, "Supervision is an applied art that must be learned and practiced." Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pembinaan, pembimbingan, dan bantuan dari

pengawas kepada para guru pendidikan jasmani SD agar perilaku mengajarnya lebih baik, sehingga proses dan hasil belajar siswa dapat meningkat.

4. Menurut Sagala (2006:246) bahwa, "Supervisi pembelajaran adalah layanan pengajaran untuk menumbuhkan proses belajar mengajar yang baik dan dapat menjaga keseimbangan pelaksanaan tugas guru." Wahyudi (2006:14) mendefinisikan, "Supervisi pembelajaran berarti proses kreativitas dari supervisor untuk membantu guru dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran." Jadi, pengawasan pembelajaran dalam penelitian ini lebih mengkonsentrasikan kawasannya pada berbagai usaha untuk membantu guru dalam proses perbaikan pembelajarannya.
5. Dalam penelitian ini pengawas adalah individu yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap guru di sekolah.
6. Pandangan Abin Syamsudin (2000:8) bahwa, "Pembinaan adalah proses yang didisain oleh sekolah untuk memajukan kualitas dan kuantitas anggota staf yang diperlukan untuk memecahkan masalah demi tercapainya tujuan sekolah." Fakry Gaffar (1987: 158-159) memaparkan, "Pembinaan merupakan suatu keharusan untuk mengatasi permasalahan tugas di lapangan." Oleh karena itu, untuk memberdayakan guru secara optimal diperlukan pembinaan yang tepat baik dalam aspek karir, mental, dan fisik.
7. Hadi Supeno (1995:27) memaparkan bahwa, "Guru adalah seseorang yang karena panggilan jiwanya, sebagian waktunya, tenaga dan pikirannya digunakan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada orang lain di sekolah atau lembaga pendidikan formal." Guru menurut Enco Mulyasa

(2006:37) adalah, "Pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya." Sebagai sosok individu guru memiliki kemampuan dalam mentransfer ilmu pengetahuan, informasi, atau pengalaman kepada peserta didiknya. Menurut Oemar Hamalik (2002:8) guru adalah suatu jabatan profesional, yang memiliki peranan dan kompetensi profesional. Menurut Moh. Uzer Usman (2003:7) tugas guru adalah, "Mendidik, mengajar, dan melatih." Dan guru merupakan sebuah profesi (Nanat Fatah Natsir, 2007:19). Dalam penelitian ini guru adalah guru pendidikan jasmani SD yang bertugas menjalankan kegiatan mengajar, melatih, dan membimbing siswa.

8. Peningkatan artinya bertambahnya kemampuan dari keadaan sebelumnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud peningkatan adalah meningkatnya kinerja guru setelah memperoleh perlakuan berupa pembinaan dari pengawas sekolah.
9. Kinerja adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah sumber kerja yang dipergunakan. Menurut Jackson, *et al.* (2003:162) bahwa, "Performance is defined as synonymous with behavior; it is what people do that can be observed and measured in terms of each individual's proficiency or level of contribution." Nanang Fattah (2004:46) menjelaskan kinerja adalah, "Penampilan atau unjuk kerja, atau cara menghasilkan sesuatu (prestasi): Kinerja berkaitan dengan daya unjuk kerja mencapai tujuan dan hasil yang digunakan." Dalam penelitian ini kinerja dimaknai sebagai kompetensi guru pendidikan jasmani berupa: (1) kompetensi dalam pengelolaan pembelajaran (attitude), (2) kompetensi akademik (skills), dan (3) kompetensi pengembangan profesi (values).

10. Pendidikan jasmani adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan anak terutama dalam aspek gerak yang menjadi sasaran utama dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Menurut Park Jae (2006:37) bahwa, "Physical education is an academic discipline to pursue truth and to study the art and science of human movement." Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendidikan jasmani adalah serangkaian proses pendidikan yang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas gerak anak yang diharapkan mampu menopang mutu anak dalam berbagai bidang kehidupan.
11. Engkoswara (2001:3) menjelaskan, "Efektivitas pendidikan dapat dilihat dari sudut prestasi dan proses pendidikan." Dalam penelitian ini efektivitas dimaknai sebagai hasil optimal yang dicapai guru setelah memperoleh pembinaan.
12. Jewett, *et al.* (1995:12) memaparkan bahwa, "Instruction is defined as the delivery system, or the aggregate of educative transactions, that constitutes the teaching-learning process for implementing the plan." Menurut Mulyani Sumantri (1988:95) pembelajaran adalah, "Suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk membimbing, membantu, dan mengarahkan siswa untuk memiliki pengalaman belajar." Dalam penelitian ini pembelajaran pendidikan jasmani yang berarti adanya interaksi positif antara guru dan siswa selama kegiatan.
13. Sekolah adalah organisasi kemanusiaan, oleh karena itu perbaikan kemampuan guru melalui pengawasan lebih sulit daripada memberikan latihan pengembangan keterampilan yang sederhana (Sagala, 2006:245). Sekolah adalah satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Dalam penelitian ini sekolah itu meliputi beberapa SD yang ada di Kota Bandung.

I. Pembatasan dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pengembangan model pengawasan pembelajaran pendidikan jasmani dalam peningkatan kinerja guru yang ditampilkan berupa efektivitas pembelajaran pendidikan jasmani di SD. Pembinaan oleh pengawas yang ditekankan pada penelitian ini adalah menumbuhkan sikap profesional yang ditampilkan guru pendidikan jasmani. Pembinaan ini meliputi arahan, bimbingan, contoh, dan saran dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Studi ini dibatasi dengan subyek terdiri atas pengawas SD, kepala sekolah SD, dan guru pendidikan jasmani SD di Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dalam hal teknik pengumpulan datanya menggunakan beberapa teknik, yaitu: (1) studi dokumentasi, (2) catatan lapangan, (3) angket, (4) wawancara, dan (5) observasi partisipatif. Dengan memperhatikan fakta-fakta yang mempengaruhi validitasnya, maka pendekatan kualititaf yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini terutama dalam hal penelitian dan pengembangan (research and development). Penelitian ini sangat bermakna terutama dalam mencari berbagai alternatif upaya perbaikan dari keadaan sebelumnya. Dalam hal ini, upaya mengembangkan model yang kurang efektif dalam pelaksanaan sebelumnya menjadi sebuah model yang lebih bermakna dan berkontribusi signifikan dalam implementasinya. Untuk melaksanakan uji coba model ini, maka diperlukan lokasi yang tepat.

Sehubungan dengan jumlah sekolah dasar yang ada di Kota Bandung jumlahnya sangat banyak, maka dalam menetapkan lokasi penelitian dibatasi dalam bentuk wilayah yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, yaitu: (1) wilayah I, (2) wilayah II, (3) wilayah III, (4) wilayah IV, dan (5) wilayah V.